

BAB III

POLIGAMI DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM

A. TINJAUAN UMUM HUKUM POLIGAMI

1. Taarif Poligami

Poligami secara etimologis adalah dari perkataan Greek iaitu *polus* (banyak) dan *games* (perkawinan), di mana seseorang laki-laki mempunyai lebih seorang istri dalam satu masa.¹

Poligami dalam kata lain ialah seseorang laki-laki yang beristri lebih dari satu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami berarti sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya pada waktu yang bersamaan.² Kamus Ilmiah Populer pula mentaktif poligami adalah perkawinan antara seorang dengan dua orang atau lebih, namun cenderung diartikan perkawinan satu orang suami dengan dua atau lebih istri.³ Di Singapura, poligami dibagikan kepada dua jenis yaitu poligini dan poliandri. Poligini ialah seorang laki-laki mempunyai lebih dari seorang istri, manakala poliandri ialah seorang istri mempunyai lebih seorang suami.⁴

Secara istilah pula, poligami adalah terjemahan daripada perkataan Arab, *taaddud az-zaujaat* yang berarti mempunyai isteri berbilang-bilang atau banyak.⁵ Para sarjana bersepakat bahawa poligami ialah seorang suami mengawini lebih dari seorang istri. Secara terminologi,

¹ Hassan Shadily, Ensiklopedia Indonesia, (Jakarta: Sinar Baru Van Houve, 1984), h. 2736

² Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 885

³ Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya: Arloka, 1994), h. 606

⁴ http://www.romm.gov.sg/about_marriage/romm_polygyny.asp

⁵ Ibrahim Anis et.al, al-Mu'jam al-Wasith, Juz 1, (Mesir: Dar al-Maarif, 1972), h. 405

poligami merupakan ikatan perkahwinan dalam hal mana suami mengahwini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama, di mana laki-laki yang melakukan poligami, dikatakan bersifat poligam.⁶ Dalam kata lain, poligami ialah beristri lebih dari satu.⁷ Berdasarkan takrif-takrif ini, tidak ada perbezaan pandangan tentang konsep poligami di mana semua pihak sependapat bahwa poligami memberi arti perkahwinan seseorang dengan lebih seorang pasangan, di mana dalam terminologi yang lebih khusus poligami jenis poligini ialah suami beristri lebih seorang secara serentak, dan poliandri adalah istri yang bersuami lebih seorang secara serentak. Sedangkan Islam, istilah poligami hanya khusus untuk suami, kerna wanita tidak boleh bersuami lebih seorang dalam waktu yang sama.

2. Sejarah Poligami

Dari sudut sejarah, poligami merupakan satu amalan yang telah diamalkan orang bangsa-bangsa terdahulu, termasuk penganut agama-agama langit. Bangsa-bangsa kuno dari Mesir, Parsi, India, Russia, Arab dan Jerman dikatakan telah mengamalkan poligami ini, terutama di kalangan raja-raja dan pembesar. Kemudian, dalam sejarah agama langit seperti agama Nabi Musa yang berdasarkan kitab Taurat dan agama Nabi Isa berdasarkan kitab Injil juga membenarkan amalan poligami ini. Kitab Taurat dikatakan menghalalkan poligami dimana Sayyid as-Sa'dan mengatakan bahwa Nabi Musa mempunyai dua istri,⁸ sedangkan Nabi Sulaiman mempunyai 100 istri, demikian juga nabi-nabi Bani Israel yang lain, termasuk Nabi

⁶ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 43

⁷ Moch. Anwar, *Fiqh Islam: Muamalat, Munakahat, Faraid dan Jinayah*, (Bandung: PT Masrif, 1980), h. 149

⁸ Sayyid bin Abdul Aziz as-Sa'dan, *Istriku Menikahkanku*, terj. Agustimar Putra, (Jakarta: PT Darul Falah, 2007), h. 122-123



Daud telah mempunyai ramai istri yang disatukan serentak, sehingga bisa dibuat kesimpulan bahwa dalam agama Nabi Musa (kini Yahudi), amalan poligami telah disyariatkan.

Pada zaman Nabi Isa, pengutusan kitab Injil telah menyempurnakan syariat Nabi Musa. Berdasar Injil Mathius, digambarkan bahwa Malukut al-A'la melalui al-Masih telah menyatukan antara lima istri dan 10 istri, sehingga ia dianggap sebagai amalan yang dibolehkan. Dalam kata lain, Injil telah menyempurnakan syariat Taurat dan membolehkan amalan poligami di kalangan umat Nabi Isa. Adapun tindakan gereja mengharamkan poligami, ia adalah perbuatan ahli-ahli agama mereka (Nasrani atau Kristen), bukannya syariat yang berdasarkan Injil. Sebelum kedatangan Islam, dikatakan bahwa tidak ada limitasi dalam poligami, di mana seseorang laki-laki bisa sahaja mengawini seberapa banyak perempuan yang diinginya. Sehingga diriwayatkan bahwa Nabi Daud sebagai seorang Nabi dan raja, mempunyai 700 istri dan 300 gundik.⁹ Keadaan ini membuktikan bahwa agama-agama terdahulu bukan sahaja tidak mengharamkan poligami, bahkan disyariatkan poligami sehingga menjadi praktek sunnah di kalangan Nabi-nabi sejak zaman Nabi Musa. Nabi Ibrahim sendiri mempunyai dua istri yang terkenal iaitu Sarah dan Hajar, sedangkan banyak riwayat mengatakan beliau mempunyai empat istri.

Selain dalam sejarah Nabi-nabi, bangsa Arab yang diturunkan al-Quran kepada mereka juga terkenal kerna mengamalkan poligami. Sebelum zaman Islam poligami bukan sahaja dilakukan tanpa had, tetapi juga menjadi pengukur darjat seseorang laki-laki, di mana laki-laki yang mempunyai istri ramai dianggap kaya, berpengaruh dan berkemampuan. Mereka

⁹ Yusuf al-Qardhawi, Hayatul Islam Fatawa Mu'asirah, terj. As'ad Yasin, Fatwa-fatwa Kontemporer, Jil. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1988), h. 683



dihormati kerana mempunyai ramai istri, sedangkan kedudukan para istri itu sendiri, sama ada terbela atau tidak, tidak mendapat perhatian masyarakat. Kebanyakan orang Arab menjadikan istri mereka sebagai obyek memuaskan nafsu sahaja. Wanita hanya menjadi terhormat kerna menjadi istri orang yang terhormat sahaja. Dalam sejarah Arab, para pemimpin mereka dicatatkan mempunyai berpuluh istri, kerna ia menjadi simbol kehormatan mereka.¹⁰ Setelah kedatangan Islam, baharulah kedudukan wanita Arab terbela di mana Islam membenarkan poligami dengan limitasi terhad kepada maksimal empat orang dan wajib berlaku adil kepada para istri. Artinya, dalam sejarah dunia, jauh sebelum kedatangan Islam, poligami telah dipraktekkan di dalam masyarakat Yunani, Persia, Arab dan Mesir kuno. Ketika manusia berpoligami secara bebas, tanpa limitasi dan tidak memberikan keadilan kepada wanita, Islam datang untuk menetapkan jumlah maksimal istri dan memerintahkan supaya suami berbuat adil kepada para istri.

3. Poligami Dalam Pandangan Islam

Perbincangan tentang poligami dalam mazhab-mazhab fiqh tidak dibahasakan secara serius dan mendalam, terutama oleh para pendiri mazhab. Ulama-ulama klasik tidak membahasakan poligami dalam konteks asas perkawinan. Kebanyakan daripada mereka berpegang bahwa poligami adalah suatu yang dibolehkan dalam Islam berdasarkan dalil al-Quran dan Hadis Nabi, di mana limitasi poligami hanya terhad maksimal empat orang dan suami wajib berlaku adil kepada para isteri mereka. Dalam Mazhab Hanafi, Imam as-Sharkasi, penulis kitab al-Masbut menyatakan dalam kitabnya bahwa seseorang laki-laki yang berpoligami harus

¹⁰ Azni, Poligami Dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia, (Pekanbaru: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Uinsuska, 2015), h. 43-44





berlaku adil kepada istrinya berdasarkan dalil ayat 3, surah an-Nisa' dan hadis Aisyah tentang perlakuan adil Nabi SAW terhadap istri-istri Baginda.¹¹ As-Sharkasi turut menambahkan beberapa ancaman terhadap suami yang tidak berlaku adil kepada para istri. Imam al-Kasani, seorang lagi ulamak Hanafiyah hanya menekankan bahwa suami yang berpoligami wajib berlaku adil terhadap istri-istri dan istri berhak ke atas keadilan dari suaminya.¹² Ibnu Qudamah, ulamak Mazhab Hambali pula menekankan bahwa maksimal bilangan istri adalah empat berdasarkan surah an-Nisa (4: 3) dan dua hadis tentang kisah Ghaylan bin Salamah dan Naufal bin Muawwiyah.¹³

Imam Malik bin Anas, pendiri Mazhab Maliki menerusi kitab al-Muwatta' pula hanya menjelaskan bahwa had maksimal bagi bilangan istri dalam berpoligami adalah empat. Ini berdasarkan hadis yang dibawa oleh beliau tentang kasus seorang laki-laki Bani Saqif yang mempunyai 10 orang istri, setelah memeluk Islam, Nabi SAW menyuruhnya menceraikan enam dari istrinya dan mempertahankan empat daripadanya.¹⁴ Ini menunjukkan bahwa had maksimal istri adalah empat sahaja. Kitab al-Umm karya Imam Syafie pula telah menggariskan bahwa seseorang muslim hanya bisa mempunyai empat orang istri berdasar dalil al-Quran dan Hadis Nabi. Tiga dalil al-Quran yang dijadikan dasar ialah surah an-Nisa' (4: 3), al-Ahzab (33: 50) dan al-Mukminun (23: 5-6). Dalam surah al-Ahzab, ditetapkan hukum berkait penggiliran malam para istri, nafkah dan waris-mewarisi, manakala surah al-Mukminun pula menjelaskan hukum tentang halal menikahi wanita merdeka dan budak, serta halal untuk melakukan aktivitas bersenang-senang pada kemaluan istri dan budak

¹¹ Syamsuddin as-Sarkasi, al-Masbut, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1409/1989), V. 217

¹² Alaidin Abi Bakr bin Mas'ud al-Kasani, Kitab Bada'i as-Sana'i fi Tartib as-Syarak, Jil. II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1417/1996), h. 491.

¹³ Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, al-Mughni wa asy-Syarh al-Kabir, (Beirut: Dar al-Fikr, 1404/1984), VII: 436

¹⁴ Malik bin Anas, al-Muwatta' (ntt: tp, tt.), edisi Muhammad Fuad al-Baqi, h. 362



perempuan, tetapi tidak boleh dengan binatang.¹⁵ Hadis tentang laki-laki Bani Saqif turut dihujahkan oleh Imam Syafie tentang had bilangan istri dalam berpoligami.

B. SYARAT-SYARAT POLIGAMI

Adil menjadi syarat asas bagi membolehkan seseorang itu berpoligami berdasarkan surah an-Nisa' (4: 3). Menurut Imam Syafie, berbuat adil adalah dalam hubungan fisik, misalnya mengunjungi istri pada malam atau siang, kerna Nabi SAW membagi kepada istri-istrinya giliran malam, memberi nafkah dan berdoa.¹⁶ Adalah mustahil untuk berlaku adil dalam urusan hati. Dalil wajib berlaku adil kepada istri-istri ini berdasar surah al-Ahzab (33: 50), al-Baqarah (2: 228) dan an-Nisa' (4: 19), juga Yunus (10: 67) dan ar-Rum (30: 21).¹⁷ Suami yang mempunyai lebih seorang istri wajib membagikan malam secara adil, dan tidak boleh masuk ke kamar istri yang bukan gilirannya, kecuali jika ada kepentingan tetapi tidak boleh bermesraan. Syafie juga menyebutkan bahwa suami wajib berlaku adil kepada istri dalam berpoligami, dan istri berhak mendapat perlakuan adil itu.¹⁸ Ibnu Qudamah juga dengan menggunakan dalil yang sama meletakkan adil sebagai syarat poligami.¹⁹ Secara umum, dalil-dalil berdasarkan surah an-Nisa' (4: 3) dan (4: 129), al-Ahzab (33: 50), al-Mukminun (23: 5-6), doa Nabi, ancaman terhadap suami yang berlaku adil dan kasus laki-laki Bani Saqif menjadi hujah tentang jumlah istri terhad maksimal empat, sedangkan tuntutan berlaku adil pada an-Nisa' (4: 3) adalah berkait soal hubungan fisik, adalah soal hati yaitu cinta dan sayang yang non fisik telah menjadi kewajiban untuk adil.

¹⁵ Muhammad bin Idris as-Syafie, al-Umm, (ntt: tp, tt.), edisi al-Muzni, V: 129

¹⁶ Ibid, V: 43

¹⁷ Ibid, V: 172

¹⁸ Ibid, V: 98

¹⁹ Ibnu Qudamah, op cit, VII: 436



C. SANKSI POLIGAMI

Perbincangan tentang sanksi poligami ini terbagi kepada dua perkara, yaitu pertama, tentang konsep sanksi, dan kedua, tentang status hukum poligami. Pada yang pertama itu, terarah kepada perbincangan tentang hukum jinayat (pidana Islam), sementara yang kedua adalah berdasarkan pendapat ulamak mazhab berdasarkan nas. Ia bertujuan untuk melihat sejauh mana kriminalisasi poligami berkait atau tidak dengan doktrin hukum konvensional. Dalam hukum jinayat Islam, para ulama mengklasifikasikan tindak pidana (jarimah) kepada tiga kategori iaitu hudud, qisas-diyat dan takzir.²⁰ Hudud ialah hukuman yang bentuk dan ukurannya telah ditetapkan oleh syarak, terkait dengan hak Allah dan maslahat umum. Qisas-diyat ialah hukumann balas dan pampasan bagi kesalahan membunuh atau mencederakan dengan hukuman berdasarkan bentuk kesalahan yang dibuat. Adapun pidana takzir ialah perbuatan maksiat atau kejahatan yang sanksinya tidak ditentukan oleh syarak, berkait hak Allah dan hak hamba, dengan beragam rupa bentuk sanksi berdasarkan kebijaksanaan pemerintah. Pada asasnya para ulama dan pemerintah menjadi tindak pidana berkait poligami di bawah kategori takzir.

Terhadap bentuk-bentuk sanksi, terdapat dua bentuk sanksi yang sering dikenakan yaitu kurungan atau penjara dan denda. Para ulama mempunyai pandangan berbeda tentang hukuman kurungan ini. Terdapat ulama Hanafiyah berpegang bahawa semua kesalahan takzir boleh dikenakan kurungan,²¹ sedangkan jumhur ulamak mengatakan lapan kesalahan saja

²⁰ Abdurrahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah, Jil. V, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1999), h. 12

²¹ Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz VII, (Damascus: Dar al-Fikr, 1997), h. 5594

yang bisa dikenakan kurungan yaitu percobaan membunuh, pelarian diri oleh budak, pengingkaran penunaian kewajiban, pengakuan palsu di atas kebangkrupan, perbuatan maksiat, keengganan melaksanakan kewajiban muslim yang tidak boleh diwakilkan, pengakuan pemikiran harta secara paksa dan keengganan melakukan kewajiban ibadat yang tidak dapat diwakilkan.²² Tentang hukuman denda juga, para ulamak berbeda pendapat di sebagian ulamak menyamakan ia dengan kezaliman kerana mengambil harta orang secara zalim. Adapun Abu Yusof, Malik bin Anas, Syafie dalam salah satu qaulnya dan Ahmad bin Hanbal membolehkan berdasarkan praktek Nabi SAW dan khalifah Umar bin al-Khattab dan Ali bin Abi Talib.²³ Hukuman lain seperti memukul atau merotan, ulamak bersepakat untuk membolehkannya berdasarkan berdasarkan praktek Nabi SAW dan Khulafak ar-Rasyidin, walaupun para ulamak berbeza tentang jumlah hukuman yang dikenakan.²⁴ Dalam soal sanksi ini, boleh dirumuskan bahwa kesalahan dalam poligami adalah kesalahan takzir, yang boleh dikenakan sanksi berupa kurungan, denda dan pemukulan.

D. POLIGAMI DALAM FIKIH KONTEMPORER

Di kalangan ulama salaf, Allah menghalang kebiasaan orang Arab yang berpoligami tanpa had dengan menurunkan ayat 3, surah an-Nisa' untuk menghadkan jumlah istri maksimal empat sahaja.²⁵ As-Shabuni mengatakan, Allah mengaitkan poligami dengan anak yatim kerana para wanita adalah lemah, seperti anak yatim. Bagi perempuan yatim yang berada di bawah walinya, pabila walinya tertarik akan harta dan kecantikannya, akhirnya ia berhasrat

²² Ibid, h. 5592-5593

²³ Lihat Abdurrahman al-Jaziri, op cit, h. 349-351

²⁴ Ibid.

²⁵ Lihat Muhammad bin Ali as-Syaukani, Fath al-Qadir, Juz 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt.), h. 527



untuk mengawininya tanpa keadilan dan maskawin, lalu karena itu poligami dilimitkan jumlahnya.²⁶ Muhammad Rasyid Ridha pula berkata, bahwa jawab as-syarth ayat tersebut adalah keharusan berlaku adil terhadap wanita dan larang berbuat zalim terhadap mereka, sama seperti wajib menghindari perbuatan tersebut terhadap anak yatim.²⁷ As-Syaukani pula berkata bahwa ulama telah bersepakat tentang as-syarth dalam ini tidak mempunyai pemahaman apa-apa karena orang yang tidak takut untuk berlaku adil terhadap anak yatim, boleh menikahi lebih dari seorang wanita.²⁸

Tentang bilangan istri, menurut al-Jashshash, perkataan “mathna wa thulaatha wa ruba” adalah kebolehan laki-laki berkawin sama ada dua, tiga atau empat orang adalah tergantung kepada keinginan, di mana jika ia khawatir tidak dapat berlaku adil, ia harus mengurangi jumlah istrinya hingga menjadi satu.²⁹ “Wau” dalam ayat ini, menurut beliau adalah badal (ganti), sesuai dengan pandang al-Qurtubi yang menolak pandangan Zhahiri yang menganggap ayat ini membenarkan laki-laki memiliki sembilan istri berdasarkan jumlah istri Nabi SAW yang terkumpul sembilan orang.³⁰ Mohamad Syahrur pula berpegang bahwa ayat 1-6 surah an-Nisa’ adalah saling berkaitan di mana persaudaraan, kemanusiaan dan dasar pergaulan hidup diletakkan dalam satu ciptaan, dengan memberi fokus terhadap pembelaan kepada anak yatim. Maka perbincangan tentang poligami mesti berkait dengan keprihatinan terhadap anak yatim. Teori nazariyah al-hudud (limitasi), Syahrur mengatakan persoalan poligami terdiri dari al-had al-adna (jumlah minimal) dan al-had al-a’la (jumlah maksimal),

²⁶ Muhammad Ali as-Shobuni, Rawai’ al-Bayan: Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Quran, (ttp: tp, tt.), h. 420

²⁷ Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir al-Manar, Juz IV, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, tt.) h. 347

²⁸ As-Syaukani, op cit, h. 529

²⁹ Abu Bakar Ahmad ibn Ali ar-Razi al-Jashshahash, Ahkam al-Quran, Juz II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt.), h. 69

³⁰ Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad al-Ansori al-Qurtubi, al-Jamik li Ahkam al-Quran, Jil. III, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt.) h. 9-10



di mana seseorang yang tidak beristri seperti rahib tidak dibolehkan kerna berada di bawah had minimal, sedang jumlah maksimalnya adalah empat dan perkawinan yang melebihi batas maksimal empat akan memudharatkan.³¹

Dalam soal persyaratan poligami, Syahrur mengatakan jika seseorang ingin berkawin kali kedua, haruslah bakal istrinya adalah janda yang mempunyai anak yatim serta tidak khawatir untuk berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Masyarakat berkewajipan menetapkan keberlakuan poligami atau melarangnya berdasarkan sebab dan syarat-syarat dalam at-Tanzil al-Hakim.³² Quraish Shihab pula mengatakan untuk berpoligami seseorang perlu melepasi syarat yang tidak ringan berdasarkan keperluan semasa, tetapi keadilan menjadi asas.³³ Sejalan dengan Quraish, Asghar Ali Engineer mengatakan salah satu syarat yang membolehkan poligami adalah kemandulan isteri, tetapi suami mesti boleh berlaku adil, dengan negara bertanggungjawab menetapkan syarat-syarat ini lewat undang-undang.³⁴ Soraya al-Torki pula berpendapat bahwa adil bukan sahaja menjadi syarat untuk poligami berdasar ayat 3 surah an-Nisa', tetapi ketidakmampuan untuk berlaku adil menghilangkan hak untuk berpoligami berdasar ayat 129 surah yang sama.³⁵ Ahmad Safwat, dalam merungkaikan masalah ini, mengatakan bahawa berdasarkan kaedah hukum yang

³¹ Muhammad Syahrur, *Nadwa Ushul al-Jadidah li al-Fiqh al-Islami, Fiqh al-Mar'ah (al-Washiyah, al-Irth, al-Qiwamah, al-Libas)*, (Damascus: al-Ahalili at-Thibaah wa al-Nasyr wa at-Tawzi', 2000), h. 302

³² Ibid, h. 303-304

³³ Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran: Tafsir Mhaudu'i Atas Pelbagai Persoalan Ummat*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 200

³⁴ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, terj. Farid Wajdi dan Cici Farkha Assegaf (Yogyakarta: LSPPA & CUSO, 1994), h. 222-224

³⁵ Soraya al-Torki, *Women and Islam*, dlm. *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*, ed. John L. Esposito (New York: Oxford University Press, 1995), IV: 323





membolehkan tindakan hukum tertentu, maka harus diletakkan syarat mendapat izin pengadilan untuk berpoligami.³⁶

E. HIKMAH POLIGAMI

Sebagai agama yang sempurna, Islam telah mengatur hukum poligami dengan tujuan dan hikmah tertentu. Antara hikmah poligami ialah, pertama, bahawa wanita mempunyai tiga halangan yaitu haid, nifas dan keadaan belum sihat selepas bersalin. Dalam keadaan seperti ini, kebenaran berpoligami adalah untuk mengelakkan suami terjerumus kepada jurang penzinaan, jika ada antara istrinya berhalangan. Al-Jurjani pula menyebutkan bahwa tubuh manusia berdiri di atas empat campuran, maka pantas laki-laki beristri empat, dan laki-laki pula mempunyai empat jenis mata pencarian yaitu pemerintahan, perdagangan, pertanian dan industri, serta dengan empat istri, suami mempunyai waktu senggang tiga hari, yaitu waktu yang mencukupi untuk berkasih sayang. Kedua, untuk mendapatkan keturunan kerna ada istri yang mandul, yang tidak bisa melahirkan dan yang terlalu tua atau sakit. Maka poligami dapat menyelesaikan masalah ini tanpa merosakan rumah tangga.

Ketiga, poligami yang dibahaskan oleh banyak pengkaji telah dirumuskan sebagai solusi terhadap masalah anak yatim dan janda. Ia dapat mengelakkan seseorang janda terbiar tanpa pembelaan dan jatuh ke lembah kehinaan seperti zina dan pelacuran, menjadi tempat perlindungan untuk anak-anak yatim dalam mendapatkan kehidupan, kasih sayang dan pendidikan, serta ibu-ibu dapat sentiasa bersama dalam memberi kasih sayang dan didikan kepada anak-anak yatim berbanding anak-anak yatim ditempatkan di rumah-rumah anak

³⁶ Ahmad Shafwat, *The Theory of Mohammedan Law*, Journal of Comparative Legislation Law, Vol. 2 (1990), h. 315.

yatim yang terpisah dengan ibunya. Dan keempat, untuk melindungi dan menghormati kaum wanita daripada menjadi mangsa kebuasan nafsu kaum laki-laki yang tidak bertanggungjawab. Sekiranya tidak dibenarkan berpoligami, kaum laki-laki bisa saja berzina, melanggan pelacur atau punya perempuan simpanan, yang memuaskan nafsu tanpa perlindungan kepada perempuan. Ia sekali gus menghindari lahirnya anak luar nikah yang tidak sah keturunan dan menjadi sampah masyarakat. Berdasarkan hikmah-hikmah ini, ternyata kebenaran Islam untuk membolehkan amalan poligami adalah mendatangkan kebaikan kepada manusia.

Di sebalik kebolehan berpoligami (sebenarnya poligini), yaitu suami beristri lebih seorang, Islam tidak membenarkan pula amalan poliandri (istri bersuami lebih seorang). Larangan ini juga mengandungi hikmah, antaranya, pertama, ia adalah ketentuan Allah yang menetapkan perempuan tidak boleh mempunyai lebih seorang suami dalam satu masa. Bahkan Nabi SAW dalam satu hadis menjelaskan bahwa amalan poliandri adalah perbuatan jahiliyah. Kedua, kedudukan laki-laki sebagai pemimpin keluarga, di mana istri wajib taat kepada suami. Jika ia mempunyai lebih seorang suami, kepemimpinan suami mana yang akan ditaati dan pasti menimbulkan konflik rumah tangga. Ketiga, wanita adalah cabaran terbesar bagi laki-laki, namun sebaliknya tidak. Dengan berpoligami, laki-laki dapat merungkaikan cabaran tersebut, sedangkan ia bukan keperluan bagi wanita. Dan keempat, untuk menjaga nasab keturunan. Islam amat memberati nasab, kerna dinasabkan kepada ayahnya, bahkan menjadi dosa besar jika menasabkan diri kepada orang lain. Jika wanita disetubuhi oleh ramai laki-laki, pasti tidak jelas anak siapa yang berada dalam rahimnya, yang pasti tidak jelas untuk dinasabkan kepada suami yang mana.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

